



# Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

## Perda Diketuk Beberes Sampah Dikebut

DILARANG MEMBUANG  
SAMPAH DI SINI



# Untaian Awal Tahun



Tak terasa, langkah kaki ini sudah menapaki tiga tahun sejak diluncurkannya majalah Cirebon Katon dari semula bernama Biwara. Masih seumur jagung. Namun, penuh dinamika, baik eksternal maupun internal. Eksternal tentu saja salah satunya karena pandemi Covid-19 di tahun pertama.

Dalam kurun tiga tahun kami terus berbenah, berinovasi dalam setiap dalam memproduksi majalah ini. Mulai dari penyiapan konten, pemilihan isu, reportase, wawancara, pemotretan, dan proses pencetakan. Meski demikian, kondisi itu justru membuat kami makin dinamis, terpacu, dan bersemangat.

Sedangkan dinamika internal lahir dari semangat untuk terus menyajikan yang terbaik. Eksplorasi ide, diskusi, dan adu argumen kerap terjadi di sela-sela menyiapkan konten dan tampilan majalah.

Lega dan senyum bersama adalah ujung dari pergulatan itu.

Apa yang terjadi selama kurun 3 tahun menjadi sangat penting untuk diingat kembali sekaligus menjadi bahan introspeksi untuk kami.

Tahun baru menjadi salah satu momentum untuk merayakan, mengevaluasi dan beresolusi agar berbenah lebih baik terus menerus.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pembaca budiman Cirebon Katon yang senantiasa setia memberikan masukan, kritik, dan saran. Kami juga mengapresiasi kepada segenap informan dan pihak yang turut membantu menyajikan karya jurnalistik ini.

Semoga di tahun baru ini, kehadiran Majalah DPRD Kabupaten Cirebon semakin lebih baik dan inspiratif tentunya. Terakhir, di awal tahun ini, kami menyajikan tema yang selalu menarik untuk dibahas mengenai sampah. Selamat tinggal tahun 2022. Selamat Tahun Baru 2023. Salam Cirebon Katon!

## Pembina/Penasehat :

**H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si**  
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Rudiana, SE**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Teguh Rusiana Merdeka, SH**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Drs. H. Subhan**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

## Pengarah :

**Hj Eriati**  
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

**Munawir, SH.**  
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

**H. Sofwan, S.T**  
(Ketua Komisi 1)

**Pandi, S.E**  
(Ketua Komisi 2)

**Anton Maulana, S.T, M.M**  
(Ketua Komisi 3)

**Aan Setiawan, S.Si**  
(Ketua Komisi 4)

## Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

**Ikin Asikin, S.Sos, M.Si**  
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

## Wakil Pimpinan Redaksi :

**Drs. Raden Chaidir Susilaningrat**  
(Kabag Humas, Protokol, Kerjasama, dan Aspirasi)

**Drs. H. Sucipto, MM**  
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

## Redaktur Pelaksana :

**Handi Eko Prasetyo, S.Kom, MM**  
(Kasubag Humas dan Protokol)

## Redaksi Ahli :

**S. Yudi**

## Penyunting :

**Dra. Puti Amanah Sari**  
(Kasubag Kerjasama dan Aspirasi)

## Redaktur :

**Yusuf**

## Reporter :

**Supardi • Kustano • Muiz • Amir**

## Fotografer :

**Qushoy**

## Desain Grafis :

**Boyke Datu • Andri**

## Data dan Riset :

**Oman**

## Distribusi :

**Firman • Misbah**

## Korespondensi:

**redaksi.cika@gmail.com**

## Penerbit :

**Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon**  
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon  
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



## 04 | FOKUS

Jalan Panjang Perda Sampah

10 | Satu Kecamatan Wajib Ada TPST



## 14 | KILAS

Sinergi Wujudkan Sekolah Aman



## 18 | PUBLIKA

Kabel Listrik Kendur Ancam Keselamatan



## 22 | LENSА

Memayu Ki Buyut Trusmi  
Rindu Warga Trusmi Terobati



## 24 | PROFIL

Emha Syahrul Alam

Hobi Nge-Trail, Tapi Tetap Sopan di Jalanan

## 28 | DINAMIKA

Komisi I: Percepat Digitalisasi Kearsipan

30 | Raperda Pendidikan Pancasila dan Wasbang Dihantarkan

32 | Perda Pengelolaan Keuangan Daerah Disahkan

34 | Perda Dana Cadangan Pilkada 2024 Disetujui



## 36 | POTENSI

Waduk Kirota

Butuh Sentuhan Agar Jadi Wisata Unggulan



## 38 | DESA

Kedungdawa

Tahun Depan Punya Wahana Air

# Jalan Panjang Perda Sampah

Sempat ditunda selama 2 tahun, Perda Pengelolaan Sampah akhirnya disahkan. Diharapkan akan menjawab persoalan sampah di Kabupaten Cirebon. Bagaimana perjalanannya?



**B**aru enam bulan dilantik, DPRD Kabupaten Cirebon mengusulkan 14 rancangan peraturan daerah (raperda) dalam Propemperda tahun 2020. Salah satu raperda yang diusulkan, yakni perubahan total Perda No 7 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

DPRD menilai, Perda No 7 tahun 2012 telah usang. Tak lagi relevan untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh di Kabupaten Cirebon. Menjawab kebutuhan itu, DPRD Kabupaten Cirebon berinisiatif merombak total perda setelah mendapat dorongan dari berbagai elemen masyarakat.

DPRD berharap, raperda sampah akan menjawab persoalan sampah sejak dari rumah. Dilanjutkan tingkat desa yang berkewajiban menyediakan tempat pembuangan sementara (TPS), mendorong

pembukaan tempat pembuangan akhir (TPA) baru untuk wilayah Cirebon timur, dan mengatur mekanisme pengelolaan sampah dari tingkat desa hingga kabupaten.

Untuk memastikan raperda sampah benar-benar relevan, DPRD juga melakukan kajian komparatif dengan berkunjung ke TPA Gunung Santri dan studi banding ke berbagai daerah untuk mencari solusi pengentasan sampah. Selanjutnya DPRD menghantarkan raperda dalam rapat paripurna.

“Kita memang sejak awal inisiasi revisi perda sampah. Dibutuhkan hukum yang tegas untuk mengaturnya, sehingga masyarakat akan mengetahui kemana arah pengelolaan sampah yang baik. Perda sampah tahun 2012 sudah tidak relevan sehingga perlu revisi,” jelas Hermanto, anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Juni 2020 silam.

DPRD menargetkan pembahasan perda sampah akan selesai di akhir 2020. Namun impian itu gagal terwujud, setelah pagebluk Covid-19 menyerang tatanan kehidupan. DPRD terpaksa beralih fokus. Revisi Perda Sampah harus diundur sehingga mengalami keterlambatan.

Memasuki tahun 2022, DPRD kembali mengusulkan agar raperda sampah bisa segera diketuk. Senin, 3 Oktober 2022, DPRD telah menjadwalkan paripurna bersama Bupati Cirebon untuk mengesahkan Perda Sampah. Sayangnya, paripurna harus batal karena ketidakhadiran bupati. Ketidakhadiran Bupati Cirebon pun mendapat kritik sebagian anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

“Kita sudah datang tepat waktu, tapi bupati mendadak membatalkan paripurna,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan.

Selang dua hari, DPRD bersama Bupati Cirebon akhirnya menggelar paripurna kembali untuk mengesahkan raperda sampah.

“Apakah raperda sampah bisa kita sahkan menjadi Perda?” tanya Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi kepada seluruh peserta sidang. “Setuju,” serentak peserta sidang paripurna menjawab.

Ketukan palu siang itu, Rabu, 5 Oktober 2022, menjadi penanda Perda tentang Pengelolaan Sampah Tahun 2022 akhirnya resmi disahkan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur agar ada turunan regulasi bagi pemerintah daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Hanifah sekaligus Ketua Pansus Perda Pengelolaan Sampah mengatakan, kehadiran perda sangat urgen. Mengingat volume sampah di Kabupaten



Cirebon yang sudah *over*.

Hanifah menjelaskan, pembahasan perda sempat ditunda. Sejak 2020 diajukan, baru disahkan tahun 2022. “Karena ada beberapa Perda yang perlu didahulukan, jadi Perda Sampah ini sempat mengalami penundaan,” jelasnya.

Ada beberapa poin penting dalam Perda tersebut. Dimana mengatur kewajiban Pemda dalam menangani persoalan sampah, hingga mengelola sampah menjadi sumber energi melalui teknologi.

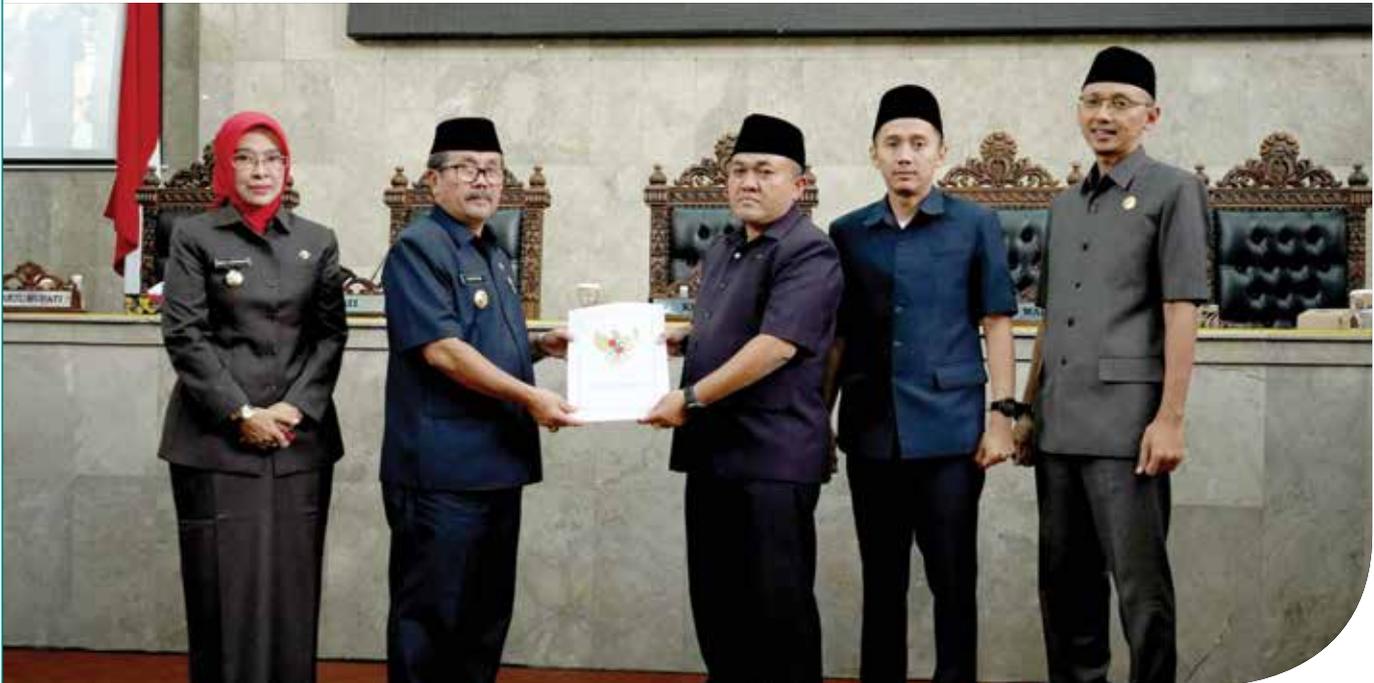
“Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan

kualitas lingkungan yang lebih asri serta menjadikan sampah sebagai sumber daya aset,” kata Hanifah.

Hanifah menerangkan, dalam perda juga mengatur sanksi dan denda administratif bagi pemerintah, pengusaha, bahkan masyarakat yang melanggar larangan atau peraturan yang terkandung dalam perda tersebut.

“Semoga segera dibuat Perbub-nya, sebagai dasar atau pedoman pemda, masyarakat dan pelaku kegiatan, usaha dalam pengelolaan sampah yang partisipatif, edukatif dan ramah lingkungan,” terang Hanifah. •Par

# 13 Poin Penting Perda Sampah



1	Perda Sampah tentang Tugas Pemerintah Daerah (Pasal 5)	Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta melakukan pengelolaan sampah melalui fasilitasi, pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Kemudian melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
2	Perda Sampah tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Pasal 6)	Pemerintah daerah memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dalam Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada), dan Rencana Induk Persampahan berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.  Lalu menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Hingga kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain setelah menetapkan lokasi SPA dan TPA.
3	Perda Sampah tentang Tugas Pemerintah Desa (Pasal 8)	Pemerintah desa wajib menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat Desa. Kemudian mengedukasi masyarakat, lembaga, kelompok dalam penanganan dan pengelolaan sampah di wilayah desa.  Sekaligus juga melakukan pengelolaan sampah melalui fasilitasi, pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah pada tingkat desa. Serta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat desa dalam bentuk penyediaan TPS/TPS 3R, angkutan dan fasilitas pendukung lainnya.
4	Perda Sampah tentang Kewenangan Pemerintah Desa (Pasal 9)	Pemerintah desa memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Desa dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah daerah.  Lalu menetapkan lembaga pengelola sampah, menetapkan besaran anggaran dan pungutan pengelolaan sampah sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan kerja sama pengelolaan sampah serta penetapan lokasi TPS/TPS 3R.

5	Perda Sampah tentang Hak Masyarakat Kabupaten Cirebon (pasal 10)	<p>Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.</p> <p>Dan memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan</p> <p>mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah.</p>
6	Perda Sampah tentang Kewajiban Masyarakat Kabupaten Cirebon (Pasal 11)	<p>Setiap Orang wajib mengurangi timbulan dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan</p> <p>Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan berupa TPS/ TPS 3R.</p> <p>Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dan melakukan pendaur ulang sampah.</p> <p>Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.</p> <p>Setiap Orang atau pelaku usaha yang menggunakan Persil untuk kepentingan perumahan dan/atau pemukiman wajib menyediakan fasilitas TPS Terpilah.</p> <p>Setiap Orang yang menyelenggarakan keramaian umum yang mengakibatkan timbulan sampah wajib bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah yang berasal dari penyelenggaraan keramaian tersebut.</p>
7	Perda Sampah tentang Jenis Sampah (Pasal 12)	<p>Ada 3 jenis sampah diantaranya, sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.</p> <p>Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.</p> <p>Sampah spesifik adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang timbul akibat bencana.</p>
8	Perda Sampah tentang Penanganan Sampah (Pasal 15)	<p>Diantaranya, pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilahan, untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 4 (empat) jenis sampah yang terdiri atas: sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya.</li> <li>2. Pengumpulan, dilakukan melalui: pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah, penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah dan penyediaan sarana pengumpul sampah spesifik.</li> <li>3. Pengangkutan sampah, dilakukan dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan. Pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R dan/atau SPA ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.</li> <li>4. Pengolahan sampah, meliputi kegiatan: pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi.</li> <li>5. Pemrosesan akhir sampah, dilakukan di TPA, meliputi kegiatan: penimbunan/ pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas dan pemusnahan.</li> </ol>

9	Perda Sampah tentang Lembaga Pengelola Sampah (Pasal 32)	<p>Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah.</p> <p>Lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud dapat berbentuk: kelompok masyarakat, badan usaha pengelola sampah, Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Perangkat Daerah, BUM Desa/BUM Desa Bersama, BUMD; dan/atau BLUD.</p>
10	Perda Sampah tentang Pembiayaan (Pasal 40)	<p>Seluruh pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berasal dari APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.</p> <p>Kemudian, bantuan pemerintah daerah berupa stimulan dan sarana pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dianggarkan dalam APBD.</p>
11	Perda Sampah tentang Larangan (Pasal 56)	<p>Setiap Orang dilarang:</p> <p>Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.</p> <p>Membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.</p> <p>Mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah rumah tangga dari bahan berbahaya dan beracun.</p> <p>Mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah dan fasilitas pengelolaan sampah lain yang telah disediakan.</p> <p>Membuang sampah dari angkutan umum dan/atau kendaraan pribadi ke jalan;</p> <p>Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.</p>
12	Perda Sampah tentang Sanksi Administratif (Pasal 57)	<p>Bupati menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang dan badan usaha yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.</p> <p>Sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, paksaan pemerintahan, penghentian kegiatan, uang paksa, denda administratif dan pencabutan izin.</p>
13	Perda Sampah tentang Denda Administratif (Pasal 58 dan 59)	<p>Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dikenakan sanksi administratif denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>Setiap orang yang melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan kawasan pasar yang dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>Pelaku usaha yang menggunakan persil untuk kepentingan perumahan dan/atau pemukiman, yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>Penanggung jawab penyelenggara keramaian umum yang mengakibatkan timbulnya sampah, yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p>

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

# Satu Kecamatan Wajib Ada TPST

Pemerintah memastikan akan ada penambahan armada, perluasan lahan TPA hingga TPS terpadu pengelola sampah di setiap kecamatan. Bagaimana langkahnya?



Setelah Perda tentang Pengelolaan Sampah disahkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkeajiban membenahi pengelolaan sampah. Dimulai dari penambahan jumlah tempat pembuangan akhir (TPA).

Sejauh ini, Pemkab Cirebon telah membebaskan lahan untuk pembangunan TPA yang kedua di Desa Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng.

Berdasarkan kajian *Feasibility Study* (FS), dibutuhkan 27 hektare tanah untuk TPA kubangdeleg. Sementara Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon baru membebaskan tanah sekitar 7 hektare.

Meski demikian, Kepala Bidang Pertanahan DPKPP Agung Gumilang mengatakan, pembebasan tanah di kawasan TPA kubangdeleg akan selesai di

tahun 2023.

“Kedepan dengan adanya perda ini kami akan selesaikan sisa 20 hektare. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan persiapan lahan untuk TPA di tempat lain. Karena TPA kubangdeleg hanya mampu menampung sampah dari 16 kecamatan saja,” jelas Agung.

Kabid Sanitasi dan Permukiman Dinas PUTR Kabupaten Cirebon Sugeng Wahyudi mengungkapkan, TPA kubangdeleg dirancang memiliki sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos.

Ia pun memastikan pembangunan akan segera diresmikan dan diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di tahun mendatang. Pembangunan

TPA kubangdeleg menghabiskan biaya Rp 17,5 miliar. "Anggaran tersebut mengalami penurunan dari semula direncanakan Rp 20 miliar," ungkapnya.

Yudi menjelaskan, selain TPA kubangdeleg, perda mengatur agar Pemda berkewajiban mere-lokasi TPS dan menyediakan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) di setiap kecamatan. Pembangunan TPST bertujuan agar sebelum sampah di-angkut ke TPA, ada proses sortir di tingkat kecamatan.

"Targetnya 1 kecamatan itu dua TPST atau sama dengan 5 atau 6 desa bisa miliki 1 TPST. Tapi yang pasti tahun 2023 kami baru akan bangun 1 TPST per kecamatan," ujarnya.

Selain TPST, pemerintah di tingkat kecamatan juga berkewajiban melakukan sosialisasi dan mengajak kepala desa dan masyarakat mengelola lingkungan.

"Saya sepakat dengan program TPST di tiap kecamatan. Kita akan buat regulasi turunan dengan membuat keputusan camat. Kami juga akan ambil contoh 2 desa untuk melakukan gerakan bersih lingkungan," ujar Camat Lemahabang Rita Susana Supriyanti.

Sementara untuk desa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon juga berupaya melakukan pembinaan agar membuat TPS 3R melalui kelompok kerja (pokja).

"Nanti tim turun ke lapangan sosialisasi, konsolidasi pembentukan pokja di 200 desa. Anggarannya sudah ada," ujar Fitroh Suharyono, Kabid Kebersihan dan Pertamanan DLH Kabupaten Cirebon.

Sejauh ini baru 113 desa yang telah memiliki pokja. Dari jumlah tersebut hanya terdapat 15 TPS bersistem 3R. "Kedepan kita



mewajibkan desa-desa memiliki TPS 3R," jelasnya.

Fitroh menyebut, ada pemberlakuan sanksi bagi yang tidak mengikuti instruksi. Rencananya dia akan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penjagaan di setiap tumpukan sampah. Bahkan, ada sanksi pemotongan dana desa jika desa tak mengikuti instruksi pengelolaan sampah.

"Dengan adanya perda ini, kami tidak ragu untuk menekankan ke setiap desa. Kami juga akan memberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada," tegasnya.

Di sisi lain, DLH juga akan menambah jumlah armada pengangkut sampah sebanyak 30 unit. "Kita sudah siapkan anggarannya juga untuk armada," jelas Fitroh.

Fitroh menuturkan, masalah sampah bukan hanya kewajiban dinas tertentu saja, melainkan tugas bersama, bahkan masyarakat pun memiliki kewajiban untuk hidup bersih. Setelah adanya perda sampah, Fitroh berharap baik pemerintah ataupun masyarakat akan bersinergi.

"Ini kan tugas kita bersama, saya harap masalah sampah di Cirebon bisa beres lah," tuturnya. •Par

# Seluruh Desa Bakal Punya TPS

Perda sampah mengatur pengelolaan sampah sejak dari rumah dan kewajiban desa-desa memiliki TPS. Ada sanksi bagi yang menjalankannya. Bagaimana tanggapan pemdes?



**P**eraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah yang disahkan Oktober 2022 lalu, menjelaskan kewajiban pemerintah desa (pemdes) mengelola sampah.

Dalam Perda menyebutkan, pemdes ditugaskan untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Desa juga berkewajiban mengelola sampah melalui fasilitasi, pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah serta penyediaan TPS/TPS3R.

Kelahiran perda pun disambut baik Kuwu Desa Ciawigajah Nunung Nurhadi. Ia sangat mendukung adanya perda pengelolaan sampah. Melalui Perda ini, kata dia, akan memudahkan pemerintah desa mengatasi persoalan sampah yang masih belum tuntas. Baik dari perencanaan, pengalokasian anggaran maupun pelaksanaan.

“Semoga adanya perda pengelolaan sampah ini

dapat mempermudah pengalokasian dan penerimaan bantuan program yang membutuhkan banyak biaya. Selain itu, ada sanksi yang menunggu bagi pembuang sampah sembarangan,” kata Nunung.

Nunung pun berjanji, akan mengoptimalkan penanganan sampah. Ia berencana menambah enam mesin pengolah sampah organik berupa kompos serta meningkatkan pengolahan sampah organik.

Saat ini Pemdes Ciawigajah telah memiliki tempat pengolahan sampah terpadu *reduce, reuse, recycle* (TPS3R) yang letaknya jauh dari pemukiman warga. Di dalamnya ada satu mesin pengolah sampah organik dan dua mesin pencacah sampah plastik.

Namun demikian, kata Nunung, satu mesin pengolah sampah organik yang tersedia belum cukup untuk mengurangi debit sampah organik rumah tangga, terutama yang berasal dari kotoran kambing.

“Ada enam kandang kambing milik masyarakat di Ciawigajah. Jadi dalam setahun kami belum bisa



mengolah semua kotoran kambing menjadi pupuk,” ujarnya.

Di tahun 2023, Pemdes Ciawigajah akan menyediakan enam mesin pengolah sampah organik yang ditempatkan di setiap kandang atau blok desa. Sehingga pengolahan sampah organik bisa selesai di blok masing-masing.

“Nanti disiapkan petugas pengolah sampah organik dari enam blok di Ciawigajah. Sehingga pengolahan sampah organik bisa selesai di tiap blok. Tidak lagi diangkut ke TPS3R yang ada sekarang,” jelas Nunung.

Untuk merealisasikannya, Pem-

des Ciawigajah akan mengubah Peraturan Desa tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan perdes yang baru, diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan sampah di Ciawigajah.

“Di perubahan perdes nanti akan dibahas teknis pengelolaan sampahnya, kemudian jenis pelanggaran dan sanksi bagi warga yang membuang sampah sebarang tempat. Selain itu akan dibahas juga *reward* bagi blok yang terbersih dari sampah setiap tahunnya,” tuturnya,

Selain Ciawigajah, Pemdes Pilangsari dan Gumulunglebak juga

mendukung penuh disahkannya perda pengelolaan sampah. Mereka menilai, perda semestinya diterapkan sejak lama.

Kuwu Desa Pilangsari Muzadi berencana mendirikan TPS sendiri untuk mitigasi *overload* sampah melalui dana desa.

“Dalam rangka menindaklanjuti penerapan perda tersebut, kami sudah menggelar musyawarah desa melibatkan BPD dan tokoh masyarakat. Hasilnya alokasi dana desa tahun 2024 akan diprioritaskan pada pembangunan tempat pembakar sampah,” ujarnya.

Sementara itu, Pemdes Gumulunglebak baru akan menggelar musyawarah desa mengenai program penanganan sampah dalam waktu dekat.

Sejauh ini, Pemdes Gumulunglebak hanya sebatas sosialisasi pencegahan dan kerja bakti mengangkut sampah. Sementara TPS belum tersedia karena terkendala lahan. Alhasil, sampah berserakan di pinggir sungai dan jalan perbatasan desa masih banyak ditemui.

“Letak tanah Desa Gumulunglebak jauh dari permukiman warga. Yaitu di belakang jalan tol dan harus melewati desa lain dulu. Sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun TPS di lokasi tersebut,” jelas Kepala Seksi Kesejahteraan Pemdes Gumulunglebak Ucup Supriatna.

Meski demikian, warga telah mampu membedakan sampah rumah tangga jenis organik dan non organik.

“Selama ini masyarakat menangani sampah dengan memilah, menimbun di galian lahan maupun menjualnya ke pengepul sampah. Semoga setelah adanya perda sampah bakal mengentaskan sampah,” tandasnya. •Muizz

## Sinergi Wujudkan Sekolah Aman

**K**omisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menerima audiensi Ikatan Remaja Masjid (IRMA) Kantor Cabang Dinas (KCD) 10 Kabupaten Cirebon.

Koordinator Pembina IRMA Hamdan, S.Pd.I, mengatakan, audiensi ini bertujuan untuk mendapat masukan serta mendengar saran dari DPRD Kabupaten Cirebon mengenai beberapa isu strategis di kalangan pelajar.

Seperti, kasus pelecehan, perundungan, serta sikap intoleran yang terjadi di lingkungan sekolah. Hamdan menegaskan, IRMA siap menjalin kerjasama

ma dengan seluruh instansi di Kabupaten Cirebon untuk langkah preventif.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Nurholis pun menyambut baik langkah IRMA. Nurholis mengatakan program yang digagas IRMA perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ia pun berjanji akan segera menindaklanjuti hasil audiensi tersebut.

“Mudah-mudahan kedepan semakin banyak pelajar yang tergabung dalam kegiatan ini, agar hal-hal negatif yang sering terjadi di kalangan pelajar dapat dihindari,” kata Nurholis.



# Peresmian Ekowisata Mangrove Pengarengan

**K**etua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi beserta Bupati Cirebon Imron meresmikan ekowisata hutan mangrove Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan. Turut hadir dalam acara tersebut Community Development Manager Cirebon Power Hafid Saptandito.

Dalam sambutannya, Luthfi menyampaikan apresiasi kepada Cirebon Power dan masyarakat sekitar yang telah berkolaborasi melahirkan objek wisata menarik di kawasan timur Cirebon. Luthfi berharap, upaya kolaborasi ini dapat terus diwujudkan

untuk pengembangan ekowisata mangrove.

“Ini contoh hasil karya dari Cirebon Power untuk pariwisata Cirebon. Kalau bisa perhatiannya terus ditambah,” ujar Luthfi.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron juga berbangga sekaligus mengapresiasi hadirnya objek wisata baru di Kabupaten Cirebon. Meski demikian, beberapa hal untuk menunjang wisata akan segera dibenahi. Seperti akses jalan, kebersihan, keamanan dan kenyamanan.

“Semoga segera kita lakukan perbaikan di tahun depan,” katanya.



## Dorong Legalisasi Padi Varietas Baru

**K**omisi II DPRD Kabupaten Cirebon beraudien- si dengan sejumlah pegiat pertanian serta Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Kegiatan yang berlangsung di ruang banggar tersebut digelar dalam rangka mendorong legalisasi benih padi varietas baru yang berhasil ditemukan oleh Usman Efendi, seorang pegiat pertanian asal Desa Tegalsari, Kecamatan Plered.

Menurut Usman, temuan benih dari hasil kaw- in silang antara beberapa varietas itu diakui lebih unggul dan efisien dibanding sejenisnya. Bahkan, varitas baru itu mampu meningkatkan hasil panen di atas rerata. Usman berharap, dengan adanya

temuan tersebut mampu membawa Kabupaten Cirebon menjadi lumbung pangan di Jawa Barat.

Hasil temuan tersebut lantas diapresiasi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Pandi, SE. Pandi berjanji akan mendorong Dinas Pertanian untuk segera mengupayakan uji lab dan legalisasi atas penemuan tersebut. Upaya itu dimaksudkan agar segera ada *release* dari Kementerian sehingga benih penemuan tersebut bisa segera digunakan para petani Kabupaten Cirebon.

“Wajib kita dukung untuk kesejahteraan petani serta meningkatkan ketahanan pangan,” tegas Pandi.



# Sambut Hangat Tur Yatim Piatu

Pemerintah Desa (Pemdes) Ambulu, Kecamatan Losari mengajak puluhan anak yatim piatu berkunjung ke kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Usut punya usut, kedatangan puluhan anak tersebut, merupakan program city tour untuk memotivasi sekaligus menghibur dan membuka wawasan anak-anak yatim dan piatu asal Desa Ambulu Losari.

Kuwu Desa Ambulu Sunaji mengatakan, city tour merupakan program rutin setiap tahun untuk membuka wawasan berpikir tentang dunia luar. Pemdes Ambulu mempunyai program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui studi tour dan wisata religi.

“Ini merupakan cara Pemdes Ambulu, agar anak-anak yang tak lagi memiliki orang tua bisa tetap semangat belajar untuk mencapai cita-cita mereka,” ujar Sunaji.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi menyambut hangat kedatangan rombongan anak-anak yatim dan piatu asal Desa Ambulu. Ia berharap studi tour dapat membawa bekal memori anak-anak agar mereka tidak minder dan punya cita-cita kelak bisa jadi bupati, anggota dewan, PNS dan bisa jadi orang sukses.

“Saya doakan semoga adik-adik ini kelak ada yang menjadi ketua DPRD atau Bupati Cirebon,” ujar Luthfi.



## Kabel Listrik Kendur Ancam Keselamatan



*Assalamu'alaikum wr wb.*

Salam hormat Bapak/Ibu anggota DPRD. Perkenalkan saya Hadi, warga Kelurahan Kemantren. Saya ingin melaporkan kondisi jaringan kabel listrik yang membentang di atas jembatan Cipager terlihat mengendur dan semrawut. Jika diamati, tampak posisi kabel tersebut hanya berjarak beberapa jengkal dari kepala orang dewasa.

Meski para warga masih bisa melintas, namun kondisinya akan sedikit berbeda ketika cuaca sedang tak bersahabat. Dimana jaringan kabel tersebut dapat berayun ke segala arah sehingga berpotensi mengancam keselamatan.

Demi mencegah hal tak diinginkan, saya harap dinas atau instansi yang berkewajiban segera dapat membenahi instalasi jaringan kabel tersebut. Kami berharap bapak ibu dewan bisa mendorongnya. Sebelumnya terima kasih kepada Cirebon Katon berkenan menerbitkan.

*Wassalamu'alaikum wr wb.*

**(Hadi/Wiraswasta/Kemantren)**

## Gedung Asrama Haji Memprihatinkan

*Belum lama, saya mengikuti pelepasan jemaah umrah di Gedung Asrama Haji Sumber yang berlokasi di Kelurahan Watubelah. Melihat itu, saya melihat Asrama Haji yang merupakan salah satu aset Pemkab Cirebon kondisinya cukup memprihatinkan. Bahkan sangat tidak layak.*

*Beberapa ruangan dan atap gedung tersebut mengalami kerusakan. Ditambah lagi, belum optimalnya penataan PKL di area depan gedung asrama haji semakin menambah kesan tak terawat.*

*Boleh jadi, kurangnya keseriusan Pemkab Cirebon merawat serta menjaga aset-aset daerah menjadi salah satu faktor, mengapa aset bangunan tersebut tampak terbengkalai.*

*Padahal keberadaan Gedung Asrama Haji tersebut cukup vital. Mengingat fungsinya yang selalu ramai saat musim haji dan umrah. Saya berharap ada pembenahan sehingga gedung tersebut juga dapat digunakan untuk kegiatan seremonial.*

**(Ifal/Watubelah/Mahasiswa)**



## Limbah Medis Dibuang Sembarangan



Belum lama ini, warga Kelurahan Babakan, Kecamatan Sumber sempat dihebohkan dengan adanya temuan limbah medis, yang secara tak sengaja ditemukan pemancing di tepi Sungai Cipager.

Diketahui, limbah yang terdiri dari selang transfusi, infus, hingga jarum suntik tersebut masuk dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan dapat berakibat pada kesehatan lingkungan terdekat.

Sebagai warga Babakan, saya berharap DPRD Kabupaten Cirebon dapat mendesak pihak berwenang untuk segera menemukan, sekaligus memberi efek jera kepada pelaku pembuangan limbah tersebut.

Selain itu, saya kira perlu adanya monitoring limbah medis secara ketat dari pemerintah ataupun dinas terkait. Jangan sampai ada lagi oknum tak bertanggung jawab dengan seenaknya menyebabkan kerugian bagi orang lain.

**(Irham/Mahasiswa/Babakan)**

## Saran Tingkatkan Prestasi Atlet

*Salam hormat Bapak, Ibu DPRD Kabupaten Cirebon. Saya Tio (28), warga Desa Ciwaringin. Sebelumnya, saya tetap menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi para kontingen Kabupaten Cirebon yang telah berjuang di ajang Porprov XIV Jabar Tahun 2022.*

*Namun di balik gelaran ajang bergengsi tersebut, saat ini Kabupaten Cirebon mengalami penurunan posisi dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat.*

*Kabupaten Cirebon hanya berhasil menduduki posisi ke-22 di provinsi dengan raihan total 62 medali, sedikit jauh dari hasil yang diharapkan. Berkaitan itu, saya harap ada sinergi dan upaya yang lebih serius baik dari pihak legislatif maupun eksekutif Kabupaten Cirebon, untuk membina atlet-atlet yang kelak bertarung demi mengharumkan nama daerah.*

*Wassalamu'alaikum wr wb.*

**(Tio/Guru/Ciwaringin)**



## Bumdes Berkah Sejahtera

# Suplai Air Bersih Ratusan Rumah

Atasi sulitnya air bersih, Bumdes Berkah Sejahtera dirikan program suplai air. Tak hanya menyelamatkan ratusan rumah, bumdes juga dapat berkah karena omzet. Bagaimana bisa?



Sebelum warga Desa Wangkelang sering mengalami kesulitan air. Kontur tanah yang tidak merata menjadi penyebab mata air semakin langka. Menggali sumur pun tidak bisa.

Namun semua berubah setelah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkah Sejahtera Wangkelang hadir pada 2017 silam. Bumdes ini menyediakan air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan, melalui program *Water Supply and Sanitation for Low Income Community*, disingkat WSSLIC.

"Kami mendekatkan air bersih ke masyarakat. Ada masyarakat yang berada di bawah justru buat kolam. Padahal yang lain membutuhkan. Wah ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus fasilitasi agar air merata," ujar Ketua Bumdes Berkah Sejahtera Dada

Dasman menceritakan.

Dada mengatakan, program WSSLIC diatur sedemikian rupa agar terus eksis dalam distribusi air kepada masyarakat secara merata. Dada menerapkan pengukuran untuk setiap pendistribusian air.

Modal awal usaha penyediaan air bersih ini berasal dari bantuan Bumdes senilai Rp 120 juta. Dari modal itu dialokasikan untuk biaya pipanisasi dan pengeboran di tiga titik.

Masing-masing titik pengeboran itu mencapai kedalaman 120 meter dari permukaan tanah. Sehingga tidak mengganggu mata air yang lain.

Dada membuat manajemen WSSLIC menjadi lebih profesional dengan menghadirkan tenaga kerja dan operasional kerja.



## Program WSSLIC Jangkau 400 Rumah

Berkat kerja keras Dada dan anggotanya, Bumdes Berkah Sejahtera mampu menyalurkan air bersih ke ratusan rumah.

“Semuanya ada 700 rumah. Konsumen kami sudah 400 rumah atau 60 persen. Sisa 300 yang belum,” ungkap Dada.

Dada mengungkapkan, melalui WSSLIC penggunaan air bersih lebih efektif dan irit dibanding sumur bor.

“Sumur bor itu kan biaya juga. Di dalam satu rumah, rumah tangga kecil, paling 1 kubik cukup. Jadi pakai WSSLIC lebih irit,” ungkapnya.

Selain membantu masyarakat, Bumdes juga mampu menghasilkan omzet dari program tersebut. Setiap bulannya, bumdes memperoleh 20 juta.

“Rata-rata dalam sebulan per rumah membutuhkan 20 kubik, dikali 400 rumah. Dibulatkan 10.000 kubik aja. Dikali Rp 2 ribu harga per kubik. Jadi sekitar Rp 20 juta,” ungkap Dada. Meski demikian, belum semua warga membayar tepat waktu.

“Kami perkiraan yang macet per bulan ada Rp 7 juta. Jadi kira-kira per bulan kami mendapat omzet Rp 13 juta,” kata Dada.

Namun Dada telah mengatasi masalah itu. Bumdes melakukan berbagai upaya persuasif. Di antaranya dengan melayangkan surat.

“Untuk meningkatkan tagihan ini kami juga berusaha keras. Alhamdulillah dengan adanya surat pemberitahuan, surat peringatan, ada peningkatan,” katanya.

Dada berharap kedepan program penyaluran air bersih ini bisa terus berkembang, bah-

kan sampai ke luar desa jika memungkinkan.

“Di luar desa juga ada pengelola air bersih. Sifatnya saling menghargai. Tapi tidak menutup kemungkinan, kalau ada yang membutuhkan ya kita salurkan,” jelasnya.

Ia juga berharap ada pendampingan dari pemerintah daerah agar program WSSLIC di Desa Wangkelang lebih berkembang.

Bumdes Berkah Sejahtera telah memberikan dampak positif yang dirasakan warga desa. Dampak tersebut dimulai dari distribusi air yang lebih merata dan lancar, sarana *mck* berfungsi dengan baik.

“Juga teratasinya konflik akibat kesenjangan pemanfaatan air, pemberlakuan iuran air secara terukur, sehingga mendukung pengembangan ekonomi lokal juga,” pungkas Dada. •Iz



## Memayu Ki Buyut Trusmi Rindu Warga Trusmi Terobati

Setelah hampir tiga tahun warga Desa Trusmi absen dari gegap-gempita pesta adat, tahun ini mereka kembali berbahagia. Memayu Ki Buyut Trusmi atau kegiatan budaya pergantian atap bangunan makam Ki Buyut Trusmi disambut kemeriahan pengunjung.

Tampak ribuan warga mulai memadati kawasan batik trusmi sejak subuh. Berbagai elemen masyarakat antusias berkumpul di gapura batik trusmi, mulai anak kecil hingga orang dewasa.

Acara Memayu Ki Buyut Trusmi diawali dengan pacuan kuda. Diiringi arak-arakan dengan menampilkan berbagai

kebudayaan masyarakat sekitar berupa tari-tarian, hasil kerajinan batik, makanan khas Cirebon hingga patung karakter berukuran raksasa.

Selain parade ogoh-ogoh, kegiatan juga diisi dengan penampilan seni wayang, tahlil akbar di makam ki buyut trusmi, dan *ganti welit*.

"Alhamdulillah kalau bisa tiap hari kaya gini mah. Tahun ini sukses meriah. Rindu kami seperti terobati setelah 3 tahun mandek," ucap Yuliana, warga Desa Trusmi Wetan. •Soy





## Emha Syahrul Alam

# Hobi Nge-Trail, Tapi Tetap Sopan di Jalanan

Belasan tahun Alam menggeluti bidang rider motor trail. Bagi Alam, nge-trail tak sopan di jalur, tapi sopan di jalanan.

**H**obi tak memandang profesi, jabatan dan usia. Siapapun bisa berada di jalur yang sama. Begitulah kira-kira ungkapan Emha Syahrul Alam, anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang hobi menaklukkan tebing curam dengan motor trailnya.

Pria 38 tahun ini, rupanya memiliki semangat yang tak lekang usia, terutama jika menyangkut hobinya. Alam menggemari hobi yang cukup menantang: nge-trail.

Bersama komunitasnya bernama Ciremai, Alam sudah menaklukkan hampir seluruh area pegunungan di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Sudah 13 tahun Alam menggeluti hobi trail. Mulanya ia diajak teman, akhirnya senang dan keterusan.

"Awalnya diajak teman kegiatan baksos sama Polres, akhirnya senang dan berkelanjutan sampai sekarang," katanya.

Nge-trail sudah menjadi bagian dari hidup Alam. Bersama komunitasnya, Alam rutin nge-trail untuk mengisi waktu luang.

Bagi Alam, nge-trail bukan sekadar hobi. Lebih dari itu, yakni kebersamaan dan kesetaraan.



“Memang di jalur kan yang diutamakan kebersamaan. Siapa saja yang jatuh ditolong. Melatih kebersamaan. Engga ada ego. Kalau di jalur, ya lepas baju. Engga ada dandim, kapolres, DPRD, masyarakat biasa. Semua sama,” katanya menjelaskan.

Karena itulah, mengapa Alam berani memulai hobinya. Alam tak takut mencoba, sebab ia yakin akan banyak orang yang menolong dirinya.

“Pertama kali coba ya biasa aja. Enggak takut, soalnya banyak teman. Kalau jatuh banyak yang nolongin,” ucapnya.

Alam tidak memungkirkan bahwa setiap hobi karena hasrat kepuasan tertentu. Misalnya ke-

tika nge-trail ia merasa puas jika berhasil menaklukkan tantangan.

Meski banyak orang yang menilai nge-trail adalah hobi yang berbahaya, bagi Alam justru sebaliknya. Ketimbang di jalanan, ngetrail adalah hobi yang jauh lebih aman.

Ketika ada jadwal nge-trail, Alam biasanya berangkat pagi dan pulang malam. Namun tak jarang, ia baru sampai di rumah saat subuh. “Kalau kejelak hujan atau longsor sampai subuh,” paparnya.

Sebenarnya nge-trail bukan hobinya yang pertama. Sebelumnya Alam telah menggeluti hobi vespa ketika ia tinggal di Yogyakarta. Lagi-lagi karena alasan sama: kebersamaan dan kesetaraan.

“Di vespa juga sama, ada kebersamaan. Beda dengan hobi mobil, biasanya ada yang ngelit,” terang, mantan Kuwu Desa Gombang tersebut.

Kebersamaan itu rupanya bukan jargon belaka. Alam bersama komunitas Ciremai sering melakukan bakti sosial sebagai perwujudan rasa kebersamaan saat di jalur, terutama ketika terjadi bencana alam.

“Di komunitas itu kita lihat situasi. Kalau ada bencana, kita kompak. Sekarang pun kita berangkat ke Cianjur membantu mendistribusikan bantuan. Jadi, bukan hanya kumpul, terus gas-gasan saja,” katanya.

Bagi Alam nge-trail telah memberikan banyak dampak positif kepadanya. Dari nge-trail, Alam mendapat kesempatan mengenal masyarakat dari dekat. Tidak jarang ia singgah ke suatu tempat, kemudian bercakap-cakap ringan dengan warga sekitar.

Bahkan sebelum melewati jalur, Alam harus memahami dulu kondisi masyarakat di sekitar jalur trail yang akan ia lewati, terutama ketika akan menggelar *event*. Alam juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak merusak pepohonan dan habitat.

“Kita juga melihat masyarakatnya gimana. Ketika ada *event* juga kita izin ke desa yang dilewati. Kalau ada kita iuran, dapat berapa kita disumbangin semen buat tambal-tambal jalan,” ujarnya.

Setelah semua rambu-rambu itu dijalankan, barulah Alam menjalankan aksinya. Menarik gas, mendaki gunung dan lewati lembah. Menaklukkan setiap tantangan di jalur dan medan. “Ngetrail itu tak sopan di jalur, tapi Tak Sopan di jalanan,” pungkasnya berkelakar. • **Muiz**

## Nanang Suryana, M.H, Kes Berkarir dari Staf

Mengawali karirnya menjadi staf, berkat totalitasnya, kini Nanang dipercaya menjabat Kabag Fasilitas Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Bagaimana kisahnya?

**M**enjabat Kepala Bagian Fasilitas Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon tentu tidaklah mudah. Untuk sampai di posisi itu, Nanang benar-benar merintis dari bawah karena belajar dan kegigihannya selama bekerja.

Sebelum menjabat di Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, pemilik nama lengkap Nanang Suryana justru memulai karirnya di Dinas Kesehatan sebagai seorang staf. Ia kemudian diangkat sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Cirebon.

Selang beberapa tahun, Nanang dipromosikan menjadi Kepala Bidang P2P selama tiga tahun sejak 2018 sampai 2021.

Setelah bergelut di dunia kesehatan, beliau mendapat kesempatan menggeluti bidang pengabdian yang baru. Melompat dari bidang kesehatan ke bidang kepegawaian. Nanang dipercaya bergabung di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon.

Meski berbeda jauh dengan latar belakang pendidikannya, Nanang tetap menekuni jabatan barunya. Bagi dia, bekerja sesuai aturan dan tetap pada relhnya.



“Saya bekerja itu harus di rel. Sesuai dengan aturan. Meskipun melompat dari dunia kesehatan ke dunia kepegawaian, sebenarnya tetap masih dalam jalur rel yang sama,” katanya.

Nanang menempuh pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Cirebon pada 2004. Sementara gelar magisternya ia peroleh di Jakarta.

“Saya dulu kelas karyawan, saya sering diskusi tentang pekerjaan kita masing-masing, dengan teman-teman dan dengan dosen. Apa yang kita alami di pekerjaan, kita diskusikan lagi di kelas,” ungkapnya.

Bergelut dalam dunia pekerjaan, Nanang mulai menyukai keilmuan lain yang menarik minatnya, yakni hukum.

“Semenjak bekerja, saya se-

nanang hukum. Karena kan semua ada regulasi atau norma. Setiap pekerjaan saya pelajari dulu. Misalnya kalau teknis kan ada juknis, ada juklak. Saya pelajari dulu,” tuturnya.

Puncaknya tahun 2018 Nanang memutuskan S2 lagi di jurusan hukum kesehatan.

Taka sampai di situ, setelah lulus, Nanang melanjutkan pendidikan S3 di Unissula Semarang dengan mengambil jurusan hukum tata negara dengan spesifikasi kajian kesehatan.

Zaman berkembang, begitu juga tantangan yang dihadapinya. Konsekuensinya orang harus meningkatkan kapasitas supaya tidak terbawa arus. Bagi Nanang, itulah pentingnya melanjutkan kuliah, untuk meningkatkan kapasitas merespon zaman.

Kuliahnya di bidang hukum ternyata tidak menguap begitu saja. Di pekerjaannya sekarang, Nanang dituntut terus *up to date* tentang perkembangan hukum yang ada.

“Setiap regulasi harus aktif mengikuti. Sekarang yang lagi ribut, ya, misalnya, UU kesehatan di Omnibus Law, saya juga mengkaji,” katanya.

Selain itu, memahami perkembangan hukum juga penting bagi pemangku kebijakan. Misalnya dalam mengevaluasi program yang bersifat teknis, harus didasarkan pada payung hukum di atasnya.

“Bener ga nih keterkaitannya. Kalau engga, kita pertanyakan pada saat sosialisasi. Kenapa kok pada aturan tertingginya seperti ini, kok di bawahnya seperti ini,” jelas Nanang.

Bagi Nanang, perkembangan hukum adalah keniscayaan. Sebab, hukum bukan sesuatu yang kaku, akan tetapi dibuat berdasarkan kebutuhan di masyarakat.

“Contoh, kaki lima di mana-mana, kan. Semrawut, perlu diatur kan. Kita perlu tata kelola nih. Biar yang dagang dapat keadilan, yang jalan kaki dapat haknya, maka perlu dibuat peraturan,” kata dia.

Ketertarikannya pada hukum juga mengingat bahwa muara dari hukum adalah keadilan dan kesejahteraan.

“Kenapa sih ini dibentuk, bukan untuk mempersulit masyarakat. Hukum itu kan untuk keadilan, ujung-ujungnya untuk kesejahteraan,” jelasnya.

Nanang tak menyangka, karena totalitasnya selama bekerja, saat ini ia justru diamanahi menjabat Kabag Anggaran.

“Iya sebenarnya saya juga enggak tahu. Yang jelas dulu cuman staf,” tandasnya terkekeh. • **Muiz**

# Komisi I: Percepat Digitalisasi Kearsipan

Dispusip Kabupaten Bogor dinilai mampu menerapkan digitalisasi arsip. Komisi I berharap Kabupaten Cirebon segera susul digitalisasi kearsipan.



Pemerintah Kabupaten Cirebon berencana menerapkan digitalisasi arsip guna melindungi dan menyelamatkan arsip-arsip penting. Pengelolaan kearsipan di Kabupaten Cirebon dinilai belum berbasis digital bahkan masih mengandalkan cara manual.

Melihat itu, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon khawatir arsip yang tersimpan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Kabupaten Cirebon sewaktu-waktu akan hilang baik karena rusak maupun karena kejadian tertentu.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan mencontohkan, banjir yang pernah melanda Cirebon tahun lalu telah menyebabkan puluhan arsip perusahaan maupun perorang hilang. Sehingga, upaya keseriusan menjaga dan melindungi arsip berbasis digital harus dilakukan Pemerintah Kabu-

paten Cirebon.

“Apalagi arsip-arsip vital itu bisa gampang rusak sekali kalau kena air atau api. Kita harap ada langkah pencegahan,” ujar Sofwan, saat memimpin kunker di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Cirebon.

Menurut Sofwan, digitalisasi arsip merupakan salah satu cara melindungi dan menyelamatkan arsip-arsip penting. Dengan digitalisasi arsip, juga berdampak terhadap pelayanan publik. Sejauh ini, daerah yang telah menerapkan digitalisasi kearsipan salah satunya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Bogor.

Senada itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Fawaz mengatakan, digitalisasi merupakan salah satu cara melindungi dan menyelamatkan arsip arsip-arsip penting. Dengan digitalisasi arsip akan



berdampak terhadap pelayanan publik.

Karena itu, kata Fawaz, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon ingin mengetahui penerapan digitalisasi arsip yang telah dilakukan Disarpus Kabupaten Bogor.

“Kami ingin mengetahui progres di Kabupaten Bogor. Kami juga perlu tahu apa regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemkab Bogor,” ujar Fawaz.

Mendengar itu, Kepala Dispusip Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam menyambut baik langkah DPRD Kabupaten Cirebon.

Luthfie mengungkapkan, Dis-

pusip Kabupaten Bogor berhasil meraih penghargaan nasional di bidang kearsipan.

Hasil pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2021, Disarpus Kabupaten Bogor berada di peringkat keenam tingkat nasional dengan nilai A atau memuaskan. Sementara di tingkat Jawa Barat berada di peringkat pertama.

Prestasi tersebut, dinilai karena aspek kebijakan dan pengelolaan arsip, kualitas SDM hingga sarana prasarana yang memadai.

“Alhamdulillah kami men-

duduki peringkat keenam tingkat nasional dan pertama tingkat provinsi. Artinya, kami selalu berupaya menjalankan reformasi birokrasi dengan baik melalui pengelolaan arsip,” ungkap Luthfie.

Prestasi ini bukanlah tanpa sebab. Kuncinya, kata Luthfie, semua harus memiliki cara pandang yang sama terhadap pentingnya arsip. Berangkat dari hal tersebut kini pengelolaan arsip di Kabupaten Bogor bukan hanya diterapkan untuk kepentingan pemerintah, namun juga masyarakat umum.

“Kalau dulu sih pengelolaan kearsipan hanya untuk kebutuhan pelaporan kepada Bupati. Namun kini kami telah merubah pemikiran tersebut, bahwa pengelolaan arsip untuk kebutuhan masyarakat juga,” ujarnya.

Luthfie juga bermimpi ke depan semua arsip masyarakat bisa terselamatkan di depot arsip Kabupaten Bogor melalui keamanan barcode.

Sejauh ini Luthfie mengungkapkan, Dispusip telah melakukan digitalisasi arsip milik pemerintah berupa scanisasi terhadap arsip-arsip yang ada. Misalnya, 60 ribu berkas Akat Jual Beli dengan total anggaran Rp 50 juta.

Sedangkan untuk arsip milik masyarakat, Disarpus telah melakukannya terhadap ijazah di dua puluh sembilan SD.

Dalam praktik pemindahan dokumen ijazah fisik ke digital itu, Dispusip Kabupaten Bogor bekerja dengan pihak ketiga. Namun untuk autentikasi tetap melalui Kabupaten Bogor.

“Yang terpenting dalam pengelolaan kearsipan, bukan dari anggaran saja. Namun juga memiliki cara pandang yang sama terhadap pentingnya merawat dan menyelamatkan arsip,” pungkasnya. •Muizz

# Raperda Pendidikan Pancasila dan Wasbang Dihantarkan

DPRD menilai payung hukum pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan harus segera disahkan. Apa urgensinya?



Rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD tentang Pendidikan Ideologi Pancasila (PIP) dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) telah dihantarkan dalam rapat paripurna.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Khanafi mengatakan, payung hukum PIP dan Wasbang sangat penting mengingat beberapa alasan.

Pertama, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah daerah agar melestarikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kedua, wawasan kebangsaan menjadi tanggung jawab negara serta pemerintah daerah untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ketiga, raperda Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wasbang bertujuan untuk peningkatan pengamalan pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk. Sehingga diharapkan terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang berkarakter, unggul dan berjiwa pancasila.

Terakhir, hakikatnya pancasila bukan hanya renungan dan pemikiran seseorang atau kelompok



sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Akan tetapi, kata Khanafi, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia.

“Unsur-unsur itu lah yang membuat Pancasila diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia

dan ideologi bangsa. Makanya kehadiran perda dinilai penting,” ujar Khanafi.

Berdasarkan alasan tersebut, Khanafi meminta agar raperda PIP dan Wasbang sesegera mungkin dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dan DPRD. Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sangat penting ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah.

“Adapun substansi dalam raperda masih ada kekurangan akan menjadi bahan pertimbangan kami dalam pembahasan raperda yang akan dibahas bersama antara pansus DPRD dan tim raperda Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon,” jelas Khanafi.

Menanggapi itu, Bupati Cirebon Imron menyambut baik usulan DPRD Kabupaten Cirebon. Imron mengatakan, pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan penting diaktualisasikan di Kabupaten Cirebon.

“Ini penting, karena pengamalan ideologi Pancasila di Kabupaten Cirebon masih diwarnai oleh praktik-praktik yang belum sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara,” kata Imron.

Imron juga mengungkapkan, Kabupaten Cirebon termasuk zona merah radikalisme dan terorisme. Tak sedikit warga yang terpapar paham yang bertentangan dengan Pancasila bahkan minim wawasan kebangsaan.

Sehingga terbitnya perda PIP dirasa sangat mendesak. Pancasila menjadi salah satu pilar penting dari empat pilar wawasan kebangsaan sebagai penyangga yang kokoh.

“Empat pilar wawasan kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan bhinneka tunggal ika. Empat pilar wawasan kebangsaan ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan,” ungkapnya.

Karena itu, Imron mendukung penuh pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Cirebon melalui payung hukum peraturan daerah. Melalui perda ini penting untuk mempercepat internalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.

• Muiz

# Perda Pengelolaan Keuangan Daerah Disahkan

DPRD menilai kehadiran perda pengelolaan keuangan sangat penting agar penggunaan anggaran dapat tepat sasaran. Bagaimana isinya?



Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah akhirnya resmi disahkan menjadi perda pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon.

Sebelumnya, panitia khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Cirebon telah selesai dan mengkaji secara mendalam bersama tim raperda Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sekretaris Pansus III DPRD Kabupaten Cirebon Nova Fikrotushofiyah mengatakan, raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah telah dibahas dan dikaji. Dari yang semula bernama pokok-pokok keuangan daerah, berubah menjadi perda pengelolaan keuangan daerah.

“Ada perubahan nama pada raperda ini namun tidak mengubah substansi tujuan. Dan kami sepakat disahkan menjadi perda pada paripurna kali ini,” kata Nova.

Nova menjelaskan, setelah sah menjadi perda, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat serta taat kepada perundang-undangan.

“Berkaitan perda ini, kami berharap pengelolaan keuangan daerah akan sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama tim pansus DPRD dan pemerintah daerah,” jelasnya.



Nova melanjutkan, penyusunan Perda pengelolaan keuangan daerah itu memiliki landasan filosofis atas pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum dan landasan sosiologis yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta landasan yuridis untuk menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kehadiran perda diharapkan akan mencegah penyalahgunaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu ada sanksi yang disiapkan. "Perda mengatur larangan-larangan beserta sanksi," jelas Nova.

Ada beberapa larangan yang diatur dalam Perda pengelolaan keuangan kali ini. Di antaranya yakni, larangan melakukan pungutan liar (pungli) yang dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang, antar daerah serta kegiatan ekspor impor program strategis nasional.

Dalam Pasal 32 misalnya, perda menjelaskan pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan dan atau disebut nama lainnya dipersamakan dengan pungutan diluar yang diatur dalam pe-

rundang-undangan.

Menurut Nova, kepala daerah yang terbukti melakukan pungutan atau yang disebut dengan nama lainya akan di kenai sanksi secara administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Akan dikenai sanksi administrasi seperti tidak dibayarkan hak-hak keuangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 6 bulan," kata Nova

Selanjutnya, hasil pungutan tersebut akan disetorkan kembali ke kas daerah.

Nova berharap, dengan disahkannya perda pengelolaan keuangan daerah bisa menjadi payung hukum yang bersifat baku dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah.

"Semoga ini bisa menjadi payung hukum yang sah untuk kedepannya dan agar bisa berjalan maksimal sebagaimana semestinya," harap Nova.

Selain itu, Nova juga berharap, Pemerintah Kabupaten Cirebon segera menyusun peraturan bupati sebagai pelaksanaan perda sebagaimana yang sudah diamanatkan.

"Kepada Bupati Cirebon, semoga ini segera disikapi dan segera dibuatkan peraturan bupati agar bisa berjalan beriringan," kata dia.

Dengan disahkannya Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penggunaan APBD diharapkan akan transparan dan tepat sasaran.

"APBD merupakan dasar pemerintah daerah melakukan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Tentu adanya perda sebagai bagian dari upaya DPRD mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah," pungkas Nova. •kus

# Perda Dana Cadangan Pilkada 2024 Disetujui

DPRD berharap, perda dana cadangan pemilihan bupati dan wakil bupati akan membantu kelancaran kegiatan Pilbup 2024 nanti. Ada beberapa pasal yang diubah setelah Pansus IV mengkaji. Apa saja?



Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Wakil Bupati Tahun 2024 akhirnya disetujui menjadi perda pada rapat paripurna.

Sebelumnya, raperda tersebut, sempat menjadi sorotan sejumlah anggota DPRD karena kenaikan anggaran yang fantastis sebesar 69 persen. DPRD membandingkan jumlah dana cadangan pada Pilbup 2018 yang memakan anggaran sebesar Rp 50 miliar sementara Pilbup 2014 membutuhkan 84,6 miliar.

“Itu kenapa bisa naik besar sekali? Kita ingin mendengar jawaban dari bupati,” ujar Pandi, anggota Pansus IV DPRD Kabupaten Cirebon, Oktober lalu.

Meski demikian, setelah mendengarkan alasan

Bupati Cirebon, DPRD akhirnya menerima keputusan kenaikan anggaran Pilbup tersebut.

Perda disetujui berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Dana Untuk Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota yang bersumber dari APBD.

Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan mengatakan, keterbatasan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan Pilkada 2024, maka diperlukan perda dana cadangan untuk alokasi biaya yang tidak bisa dipenuhi dalam masa satu tahun anggaran.

Sejauh ini, Pansus IV telah melakukan riset, analisis dan perbandingan dengan daerah lain serta mengkaji secara mendalam bersama tim raperda Pemerin-



tah Kabupaten Cirebon berkaitan kenaikan anggaran Pilbup.

Hasilnya, Pansus IV sepakat untuk mengubah beberapa pasal dengan tidak mengubah substansi tujuannya. “Kalau judul perda tidak mengalami perubahan, namun ketentuan pasal per pasal mengalami perubahan kalimat,” ungkap Aan.

Pasal 3 misalnya, mengalami perubahan kalimat sehingga menjadi:

“Besaran dana cadangan yang dimaksudkan ditetapkan sebesar Rp 40 miliar, besaran

dana cadangan dianggarkan dalam APBD tahun 2023, kebutuhan dana Pilkada yang belum dialokasikan dalam dana cadangan dipenuhi pada APBD tahun 2024,” ujar Aan.

Selain Pasal 3, Aan juga mengatakan, perubahan kalimat dalam Pasal 4 berkaitan sumber dana cadangan yang berasal dari penyisihan atas penerimaan APBD.

Aan menyebut, perda tersebut sudah mengalami proses penyempurnaan, sehingga harus diaplikasikan dengan baik. Selain itu, dia berharap dengan

adanya perda tersebut, akan bisa membantu pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, dan berjalan sesuai yang diinginkan. Ia pun menambahkan, dengan ini selesai sudah tugas Pansus IV.

“Dari hasil masukan, pembahasan, dan penyempurnaan terhadap raperda pilkada 2024 telah disetujui dan disahkan menjadi perda. Kami ucapkan terimakasih atas seluruh atensi dan kerja keras tim raperda,” ujarnya.

Aan berharap, agar Pemerintah Kabupaten Cirebon akan dapat memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan Pilkada 2024, dan menelurkan peraturan turunannya sebagaimana amanat perda.

“Dengan ditetapkannya perda, semoga bisa mendanai kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 dengan lancar. Kita harus evaluasi apa yang terjadi pada Pilbu 2018 sila,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon Drs Imron M Ag dalam sambutannya menyampaikan, terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Imron mengapresiasi kinerja Pansus IV yang telah membantu menyelesaikan analisis terhadap perda tersebut.

“Pemerintah daerah menyampaikan terimakasih atas kerjasama anggota DPRD, khususnya kepada pansus IV yang telah intens membahas raperda di tengah padatnya jadwal para anggota DPRD. Semoga Pilbup 2024 akan berjalan dengan baik,” ucap Imron.

Imron menambahkan, setelah disahkan perda tersebut akan ditindak lanjuti kepada Gubernur Jawa Barat.

Ia pun berharap, pasca penetapan perda tersebut seluruh pihak terutama eksekutif dan legislatif dapat mendukung pelaksanaan perda yang kita setuju bersama secara konsisten. •Par

## Waduk Kirota

# Butuh Sentuhan Agar Jadi Wisata Unggulan

Waduk kirota diyakini akan menjadi wisata yang dapat mendatangkan wisatawan. Hanya butuh sentuhan Pemkab Cirebon. Seperti apa?



Selain memiliki hamparan sawah yang luas, Desa Kalideres, Kecamatan Kaliwedi ternyata juga menawarkan keelokan lanskap pemandangan bentangan air. Sebuah waduk buatan berdiri di tengah pematang sawah.

Bernama Waduk kirota, danau buatan ini merupakan fasilitas irigasi pesawahan dan budidaya ikan air tawar. Nama tersebut diambil dari sebuah blok atau dusun yang ada di Desa Kalideres.

Tak banyak yang tahu, sebelum menjadi sebuah waduk atau embung, lahan tersebut hanyalah tanah titisara desa yang tak terpakai. Hingga tahun 2006, warga meminta agar tanah tersebut diubah menjadi waduk penampung air untuk solusi saat musim pancaroba.

“Memang awalnya hanya titisara desa tak terpakai. Namun karena banyak petani yang pengen punya waduk, akhirnya dibuatlah dan diresmikan pada tahun 2008,” ungkap Supriyatno, ketua kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Kecamatan Kaliwedi.

Supri sapaanya, mengatakan, setelah berhasil menjadi solusi perairan sawah, saat ini Waduk kirota akan disulap menjadi wisata alam yang indah dengan memanfaatkan tanggulnya.

“Namanya memang waduk, tetapi untuk wisata kita hanya memakai di tanggul-tanggulnya saja,” ujar Supri.

Supri bersama rekan Pokdarwis bertekad, akan mengubah Waduk Kirota menjadi sebuah wisata alam yang indah dan megah. Ia sudah meren-

canakan matang-matang. Salah satunya dengan membuat beragam spot wisata.

“Waduk ini kita fokuskan ke wisata edukasi, selain itu juga ada wisata olahraga. Nanti kami bikin jogging track di samping waduk. Sementara ini kita baru punya spot selfie dan warung-warung di sekitar waduk,” jelasnya.

Berada di lahan seluas 3 hektare, potensi alam milik Desa Kalideres tersebut berharap mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Kendati luasnya sangat mencukupi, waduk kirotta hanya akan menggunakan 1,9 hektare saja untuk dijadikan objek wisata.

Supri mengatakan, kebutuhan anggaran untuk menyulap waduk kirotta sebesar Rp 1,4 miliar.

Meski demikian, Supri belum

menyerahkan ke pihak manapun untuk pengerjaannya. “Kita sudah membuat *set plan* tetapi belum pengajuannya. Kemarin dari Dinas juga kesini untuk meninjau lokasi, tapi belum ada bantuan dana,” kata Supri.

Saat ini masih banyak kekurangan yang menjadi kendala dalam pengelolaan waduk kirotta, salah satunya akses jalan yang sangat kurang layak untuk dilalui. Akses jalan menuju tempat waduk dipenuhi lumpur dan tanah.

“Memang kekurangannya jalan arah ke waduk masih belum bagus. Sementara ini baru kita kasih batu-batu agar jalannya tidak lembek,” terangnya.

Pengelola waduk tak dapat berbuat banyak untuk membenahi jalan karena bukan kewenangan desa melainkan Pem-

kab Cirebon. “Ini bukan jalan desa tapi jalan PUPR jadi kami bingung, kalau dibangun nanti takutnya kita salah juga kan,” jelasnya.

Supri sadar akan batas kewenangannya. Ia pun berharap Pemkab Cirebon bisa segera membantu agar akses jalan menuju waduk kirotta bisa segera diperbaiki. Menurutnya, jika wisata waduk kirotta mulai dibuka, akan memberikan dampak luar biasa.

“Sekarang saja sering ada yang berkunjung. Kita berharap sarana penghubung ini segera diperbaiki. Karena selain menjadi jantung bagi perairan petani, waduk ini juga akan menjadi tempat wisata yang akan meningkatkan ekonomi warga dan PADes tentunya,” pungkasnya. •Kus



## Kedungdawa

# Tahun Depan Punya Wahana Air

Berkeinginan meningkatkan pendapatan desa serta masyarakat, sebuah wisata air sedang dibangun Pemdes Kedungdawa. Seperti apa?



**T**ekad membangun desa wisata tengah dilakukan Pemerintah Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Mereka merancang sebuah wisata desa di atas tanah seluas 4000 meter kubik (m<sup>2</sup>).

Di atas tanah tersebut, sedang dibangun sebuah wahana air: kolam renang, waterboom dan wahana air lainnya. Tempat yang dipilih pemdes pun tak sembarang melainkan berada di lahan yang masih asri dengan suasana alam mendukung. “Tempat wisata itu akan kita namakan Gunder

Waterpark,” jelas Sanita Wijaya, kuwu Desa Kedungdawa.

Wijaya mengatakan, ia memiliki visi agar Desa Kedungdawa bisa maju, bersih serta sejahtera. Sehingga kehadiran wisata menjadi salah satu cara mencapai impian tersebut.

Dengan memiliki wisata, secara otomatis pendapatan asli desa (PADes) serta perekonomian warga sekitar pun akan meningkat. “Saya sangat yakin makanya wisata ini harus kami seriusi,” ujar Wijaya.

Sejauh ini, pembangunan Gun-

der Waterpark telah mencapai 25 persen. Wijaya menargetkan Gunder Waterpark akan selesai di tahun 2023 dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar yang berasal dari dana desa.

Meski demikian, pembangunan wisata ini sempat terkendala biaya karena relokasi anggaran untuk pembenahan infrastruktur utama. Seperti perbaikan jalan, saluran irigasi dan lainnya.

Oleh karenanya, Wijaya berharap Pemkab Cirebon dapat membantu mendatangkan investor guna mempercepat pembangunan wisata.

“Kalau ngandalin dana desa memang tidak cukup. Saya harap ada investor baik dari swasta maupun pemerintah untuk membantu pembangunan tempat wisata ini,” tuturnya.

Agar pembangunan wisata bisa cepat selesai, Pemdes Kedungdawa juga melibatkan Bumdes, karangtaruna maupun masyarakat untuk bersama-sama bergerak menyukseskan.

Belum lama ini, Wijaya mengungkapkan, telah mendapat masukan dan bimbingan dari Pemkab Cirebon untuk kemajuan sektor wisata air tersebut.

“Kami dapat arahan untuk membuat website wisata Gunder Waterpark supaya cepat dikenal masyarakat luas meski belum diresmikan,” ungkap Wijaya.

•SIs

## Gebangilir

# Prioritas Bangun Lapangan Sepak Bola

Agar para pemuda desa produktif, Pemdes Gebangilir sedang fokus bangun lapangan sepak bola.

**M**emiliki lapangan sepak bola megah, menjadi impian Pemerintah Desa (Pemdes) Gebangilir, Kecamatan Gebang.

Alasannya, semenjak mekar, Desa Gebangilir tak lagi memiliki lapangan sepak bola. Para pemuda desa pun kesulitan saat ingin berolahraga maupun membuat pertandingan.

“Kalau dulu masih Gebangmekar, setelah mekar kita gak punya lapangan,” ujar Slamet, Kuwu Desa Gebangilir.

Oleh karenanya, sejak awal 2022, Pemdes Gebangilir mulai mengalokasikan anggaran untuk pembuatan lapangan. Lahan seluas 7000 meter akan diubah menjadi lapangan sepak bola.

“Sudah kita anggarkan Rp 200 juta untuk lapangan sepak bola. Insyaallah selesai di awal tahun 2023 nanti,” tutur Slamet.

Saat ini pengerjaan lapangan sudah tahap pengurukan dan telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 45 juta. “Anggaran kita bertahap, sekarang sudah 20-30 persen. Di tahun depan baru sisanya Rp 155 juta,” jelas Slamet.

Slamet menuturkan, pembangunan lapangan sepak bola sudah disiapkan sejak 2 tahun silam. Namun karena terjadi pandemi, target tersebut tak tercapai.

“Kalau kendala sih itu aja karena anggaran sempat direlokasikan untuk BLT. Kalau yang lainnya be-



lum ada kendala,” tuturnya.

Meski demikian, Slamet optimistis di tahun 2023, pengerjaan lapangan sepak bola akan selesai dan sudah dapat digunakan.

Ia pun berharap, kedepan para pemuda desa akan lebih produktif dan lebih maju. Ia juga berharap, Desa Gebangilir akan memunculkan atlet-atlet sepak bola.

“Semoga kedepannya warga Desa Gebangilir bisa muncul atlet-atlet go nasional. Syukur-

syukur akan ada yang dipanggil timnas Indonesia,” jelasnya.

Keberadaan lapangan sepak bola, selain untuk memudahkan para pemuda, juga diharapkan agar tumbuh sentra UMKM.

“Kalau lapangan sepak bola sudah ada, tentu akan menghidupkan para pedagang kecil yang berjualan. Karena sekarang Café milik Bumdes Gebangilir sudah tidak jalan,” pungkasnya.

•Kus

# Ambulu

## Siapkan SDM Unggul

Terkesan melawan arus, Pemdes Ambulu justru yakin peningkatan SDM akan membawa desa menjadi maju. Bagaimana langkahnya?



Pemerintah Desa Ambulu, Kecamatan Losari terus berupaya meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Saat ini, desa yang berada di ujung timur Kabupaten Cirebon itu tengah getol dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat dan perangkat desa melalui berbagai program.

“Sejak awal menjabat, prioritas saya membangun SDM. Itu yang utama,” ujar Kuwu Desa Ambulu Sunaji.

Sunaji mengatakan, SDM unggul menjadi aset penting dalam

sebuah pembangunan. Di ruang desa, peran SDM yang terampil dan berdaya saing menjadi faktor penentu terhadap suksesnya sebuah desa menyongsong masa depan.

Meski terkesan melawan arus, Sunaji yakin jika sikap yang ia ambil merupakan langkah tepat dalam mengemban amanat. Ia menegaskan, pembangunan SDM sangatlah penting demi memastikan kemajuan desa.

“Sebab, tanpa dimulai dengan SDM yang unggul, usaha untuk mencapai kesejahteraan di desa rasanya akan lebih sulit,” tegasnya.

Saat ditanya alasan mengapa dirinya mengambil langkah tersebut, Sunaji menyampaikan, jika dirinya hanya melaksanakan apa yang sudah diamanatkan undang-undang.

Oleh karenanya, berbagai program yang berfokus pada peningkatan SDM pun terus ia gencarkan. Seperti pelatihan dan pembinaan, yang banyak menyasar berbagai kelompok masyarakat maupun pelajar.

Hal tersebut ia lakukan demi melatih keterampilan serta daya saing setiap individu. Melalui usaha tersebut, Sunaji berharap Ambulu kedepannya menjadi desa yang lebih mandiri dengan SDM berkualitas.

“Kita berharap ikhtiar yang kita lakukan dapat mengantar Desa Ambulu menjadi lebih sejahtera,” tutur Sunaji.

Selain mengoptimalkan SDM, usut punya usut, Pemdes Ambulu juga memiliki sebuah program *city tour*.

Program *city tour* berguna untuk memotivasi sekaligus menghibur dan membuka wawasan anak-anak yatim dan piatu asal Desa Ambulu Losari. “*City tour* ini sudah berjalan dari 2018. Melibas semua Lembaga Desa. Pada tahun 2019 kami mulai mengajak yatim piatu sedesa Ambulu yang masih belajar di TK dan SD maupun MI untuk berwisata religi,” pungkas Sunaji. •Mir

# Sindangkasih

## Benahi Irigasi dan Penyediaan Air Bersih

Sulitnya akses air bersih, membuat Pemdes Sindangkasih berscepat mengungkap program penyediaan air bersih. Ada juga pembenahan irigasi. Seperti apa?

Pemerintah Desa (Pemdes) Sindangkasih, Kecamatan Beber, tampak serius dengan cita-citanya membenahi desa. Kuwu Desa Sindangkasih Agus Sugiarto mengatakan, sejak pertama kali menjabat pada 2019 silam, Agus telah merumuskan berbagai kebijakan penting.

Beragam program disiapkan untuk menyelesaikan segudang masalah satu persatu, seperti penyediaan air bersih. Hal itu disebabkan, masih banyak warga Sindangkasih yang hanya mengandalkan sumur gali untuk mendapatkan air bersih.

“Sementara kalau sumur juga sering kekeringan kalau musim kemarau. Makanya kita inisiasi penyediaan air bersih itu,” ujar Agus.

Selain menyediakan air bersih, Pemdes Sindangkasih juga memiliki program pembangunan sarana irigasi, penerangan jalan, pembangunan gedung serbaguna serta gelanggang olahraga (GOR).

“Kalau untuk anggaran alhamdulillah sudah terkumpul 80 persen dari bantuan pusat,” ujar Agus.

Sejauh ini, pembangunan GOR baru terlaksana sekitar 25 persen. “Ukurannya lumayan yakni 20 m x 30 m dengan kebutuhan anggaran Rp 2 miliar. Jadi pengerjaannya kita cicil setiap tahun,” jelas Agus.

Agus mengatakan, program



pembangunan yang dirumuskan sempat terhambat karena pandemi. Dimana anggaran direlokasikan untuk penanganan Covid-19. Sehingga bantuan dari pemerintah pusat yang rencananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur pun harus dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Meski belum semua program terwujud, Agus tetap semangat dan optimis. Ia meyakini di sisa jabatannya semua impian membenahi Desa Sindangkasih akan

terwujud.

Agus mengatakan, sejauh ini telah mengusulkan bantuan terkait pembangunan GOR, penerangan jalan kepada pemerintah pusat melalui dinas. Menurutnya, jika hanya mengandalkan dana desa tentu tak bisa tertampung.

“Enggak mungkin kalau ngandalin dana desa saja yang sangat terbatas. Kami berterimakasih, sedikitnya sekarang pengajuan untuk program tersebut mendapat perhatian,” kata Agus. •Fik



## Kopi Tubruk

Pagi menuju siang di Januari 2023. Rinai gerimis jatuh nan lembut bak selimut. Seolah enggan menyerahkan bumi ke kehangatan mentari. “Sempurna,” saya membatin, “suasana yang pas menikmati kopi pagi.”

Saya memilih *tubruk* untuk menemani pagi yang *ngangeni* ini. Selain metode favorit dalam menyeduh kopi, *tubruk* adalah identitas, sekaligus filosofi yang pas untuk mengarungi 2023 yang syahdu menuju panasnya 2024.

Kopi *tubruk* adalah khas Indonesia, karena itulah menjadi identitas. Jepang punya metode V60, Vietnam pakai *vietnam drip*, Turki dengan teko ibrik, Perancis dengan *france press*, Itali dengan mokapot. Meski sebenarnya berbagai metode menyeduh kopi dari beberapa negara ini sekarang sudah lazim di warung-warung kopi di Indonesia.

*Tubruk* ini simbol kesederhanaan. Dia tidak butuh alat khusus nan mahal, seperti metode menyeduh kopi di beberapa negara di atas. Untuk membuat kopi *tubruk*, cukup dengan cangkir, sejumput kopi, dan air panas.

Kesederhanaan itulah yang membuat kopi *tubruk* juga mudah dibuat, alias simpel. Cukup dengan bubuk kopi dimasukan ke cangkir, lalu tuang air panas secukupnya secara perlahan; bisa juga sebaliknya, air panas dituang dulu ke cangkir, lalu taburkan kopi di atasnya perlahan. Biarkan beberapa menit, agar terjadi pelepasan karbondioksida dan proses ekstraksi sempurna, serta bubuk kopi mengendap. Lalu nikmati, sungguh simpel.

Karena sesederhana dan sesimpel itulah, alias tidak perlu teknik macam-macam, kopi *tubruk* menjadi kopi yang paling jujur disajikan. Ia tampil dengan polos dan apa adanya, serta dibuat tanpa ada rekayasa alat atau teknologi apapun.

Dari sisi rasa, kopi *tubruk* juga paling lengkap. Unsur pahit, coklat, asam, dan gurih menyatu secara unik dan apa adanya. Satu kata yang menggambarkan rasa kopi *tubruk* adalah mantap!

Hal yang sama juga pada aroma. Kopi *tubruk* menghasilkan aroma yang khas dan kuat. Harumnya menyeruak memenuhi ruangan. Keharuman kopi *tubruk* membangkitkan semangat dan kebahagiaan di pagi hari.

Begitulah memang kebahagiaan. Ia hadir dari sesuatu yang sederhana, simpel, dan jujur. Ketiganya (sederhana, simpel, dan jujur), jika digabungkan akan menghasilkan kemantapan dan kekuatan diri dalam mengarungi hari.

Nah, kalau sahabat masih gamang menghadapi hari yang menantang, cobalah seduh kopi *tubruk*. Santai sejenak, nikmati setiap seruputannya, lalu renungi dan ambil pelajaran: (1) bahwa bahagia itu hadir dari sesuatu yang sederhana, simpel, dan jujur; (2) dengan bahagia itu kita lebih mantap dan kuat menghadapi hidup.

Terlebih jika sahabat adalah penikmat kopi sejati, temukan bahwa di balik secangkir kopi *tubruk* tanpa gula itu ada rasa khas manis kopi. Konon, beberapa riset menunjukkan bahwa menyajikan kopi yang sehat itu tanpa pemanis buatan.

Jika sudah merasakan manisnya kopi tanpa pemanis, itulah rasa terdalam yang bisa kita cicip dari kopi. Begitupun hidup, dibalik setiap kepahitan selalu ada manis yang tersembunyi. Maka, jangan lupa mulailah segalanya dengan bahagia.

Sebagai media bersosial, kopi juga sering menjadi sarana pemecah kebuntuan. Maka, nikmatilah kopi *tubruk* secara bersama-sama, jauh lebih nikmat, akrab dan bahagia. Kebahagiaan bersama itulah yang membuat setiap ketegangan menjadi cair dan mudah teruraikan.

Jika, satu kali *ngopi* bersama belum selesai. Cobalah *ngopi* bareng yang kedua. Kalau belum *deal* juga, maka sering-seringlah *ngopi*. Kalau belum selesai juga, yang penting kita sudah bahagia, dan kebuntuan akan menemukan jalannya sendiri.

Jadi, jika ada yang bertanya, bagaimana mempersiapkan diri di 2023 menuju panasnya politik di 2024? Jawabannya: kopi *tubruk* saja.



PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

**Mengucapkan:**



**SELAMAT  
TAHUN  
BARU**





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**Selamat Tahun Baru**